Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2775-771X (Online)
ISSN 2962-570X (Printed)
6 (1) 2026, Page: 23194-23202

Rendahnya Serapan APBD Kabupaten Bojonegoro dan Implikasinya Terhadap Efektivitas Pembangunan Daerah

Devina Aulia Firnanda[1], Nindya Rachma Paramitha Adi[2], Eva Hany Fanida[3], Melda Fadiyah Hidayat[4]
[1,2,3,4]Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Negeri Surabaya
Corresponding Author: Devina Aulia Firnanda, E-Mail: 25040674328@mhs.unesa.ac.id

ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji rendahnya penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Kabupaten Bojonegoro serta dampaknya terhadap efektivitas pembangunan daerah. Isu penyerapan anggaran menjadi hal penting karena APBD adalah alat utama pemerintah daerah untuk mendanai program pembangunan, layanan publik, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Walaupun Kabupaten Bojonegoro memiliki potensi fiskal yang cukup tinggi, pencapaian anggaran dalam beberapa tahun terakhir tetap menunjukkan kondisi yang tidak stabil dan belum sepenuhnya efisien. Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analitis. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi dokumentasi dan literatur, yang mencakup laporan realisasi APBD, dokumen perencanaan pembangunan daerah, peraturan, jurnal akademis, buku-acuan, serta sumber relevan lainnya. Analisis data dilakukan melalui langkah-langkah pengurangan data, penyajian informasi, dan penarikan kesimpulan. Temuan dari penelitian ini mengindikasikan bahwa rendahnya penyerapan APBD di Kabupaten Bojonegoro dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, seperti perencanaan program yang kurang optimal, keterlambatan dalam proses pengadaan barang dan jasa, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia aparatur, lemahnya koordinasi antar instansi pemerintah daerah, serta adanya perubahan kebijakan selama tahun anggaran berjalan. Kondisi ini memengaruhi efektivitas pembangunan daerah, termasuk tertundanya pembangunan infrastruktur, pelaksanaan program pendidikan dan kesehatan yang belum maksimal, lambatnya pertumbuhan ekonomi lokal, serta berkurangnya manfaat anggaran yang seharusnya diterima oleh masyarakat. Penelitian ini juga menemukan bahwa meskipun kapasitas fiskal daerah besar, hal itu tidak selalu menjamin keberhasilan pembangunan jika tidak diimbangi dengan kemampuan pengelolaan anggaran yang baik. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu memperbaiki kualitas perencanaan, mempercepat proses pengadaan, memperkuat koordinasi antar perangkat daerah, meningkatkan kompetensi aparatur, serta melakukan evaluasi penggunaan anggaran secara berkala. Dengan pengelolaan APBD yang lebih baik, diharapkan pembangunan daerah di Kabupaten Bojonegoro dapat lebih tepat sasaran, efisien, dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

Kata kunci: APBD, serapan anggaran, pembangunan daerah, efektivitas, Bojonegoro.

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Atibution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah alat yang sangat penting dalam pelaksanaan pemerintahan daerah karena berfungsi sebagai dasar pendanaan untuk pembangunan, pelayanan publik, dan operasional birokrasi. Dalam konteks desentralisasi fiskal, pemerintah daerah memiliki wewenang untuk mengelola keuangannya secara mandiri sesuai dengan kebutuhan dan prioritas daerah masing-masing. Tujuan dari wewenang ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan yang lebih adil, efektif, dan responsif terhadap kondisi lokal. Oleh karena itu, kualitas pengelolaan APBD menjadi salah satu indikator utama keberhasilan kinerja pemerintah daerah.

Salah satu faktor yang umumnya digunakan untuk mengevaluasi efektivitas pengelolaan APBD adalah tingkat serapan anggaran. Serapan anggaran mencerminkan kemampuan pemerintah daerah untuk mewujudkan rencana belanja yang sudah ditentukan dalam berbagai program dan kegiatan selama satu tahun anggaran. Tingkat serapan yang tinggi biasanya menunjukkan bahwa perencanaan telah dilakukan dengan baik dan pelaksanaan program berjalan lancar. Sebaliknya, rendahnya serapan anggaran bisa mengindikasikan adanya masalah administratif, teknis, atau kelembagaan dalam pengelolaan keuangan daerah.

Fenomena rendahnya serapan anggaran masih banyak terlihat di berbagai daerah di Indonesia. Secara umum, pelaksanaan belanja daerah biasanya berjalan lambat di awal tahun dan baru meningkat dengan signifikan menjelang akhir tahun anggaran. Pola ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program belum

optimal sejak awal periode anggaran dimulai. Akibatnya, kegiatan pembangunan sering kali terlambat, pelaksanaan pekerjaan terburu-buru, dan kualitas output program berisiko menurun.

Kabupaten Bojonegoro adalah salah satu daerah dengan kapasitas fiskal yang relatif besar dan memiliki potensi pendapatan daerah yang kuat. Kondisi ini seharusnya menjadi modal penting dalam mempercepat perkembangan daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Namun, meskipun kemampuan fiskal cukup besar, realisasi anggaran belum selalu dioptimalkan. Pada beberapa periode, tingkat serapan APBD Kabupaten Bojonegoro menunjukkan adanya perbedaan antara target dan realisasi yang seharusnya dicapai.

Rendahnya serapan APBD bisa dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Beberapa kendala yang sering terjadi meliputi perencanaan yang tidak matang, keterlambatan dalam proses pengadaan barang dan jasa, kurangnya kompetensi sumber daya manusia, lemahnya koordinasi antar instansi daerah, serta prosedur birokrasi yang panjang. Di samping itu, perubahan regulasi atau penyesuaian kebijakan di tengah tahun anggaran juga bisa memperlambat pelaksanaan program yang telah direncanakan sebelumnya.

Masalah ini tidak hanya berimbas pada administrasi keuangan, tetapi juga berdampak langsung pada efektivitas pembangunan daerah. Keterlambatan dalam penyerapan anggaran dapat menyebabkan terhambatnya pembangunan infrastruktur, penurunan kualitas pelayanan publik, tidak tercapainya target pembangunan, serta berkurangnya manfaat program yang seharusnya diberikan kepada masyarakat. Dalam jangka panjang, situasi ini dapat mengurangi kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.

Dengan mempertimbangkan hal tersebut, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya serapan APBD di Kabupaten Bojonegoro serta dampaknya terhadap efektivitas pembangunan daerah. Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan gambaran tentang kendala dalam pengelolaan anggaran dan sekaligus menawarkan masukan yang relevan untuk perbaikan tata kelola keuangan daerah agar pelaksanaan pembangunan dapat berjalan lebih baik.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengelolaan keuangan daerah adalah sebuah sistem yang saling terkait untuk mengatur seluruh siklus keuangan daerah, dimulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengelolaan, pelaporan, hingga pengawasan (Nordiawan, 2012). Proses ini bukan hanya administratif, tetapi juga menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya publik dengan tanggung jawab dan fokus pada hasil.

Dalam rangka desentralisasi fiskal, pengelolaan keuangan daerah memiliki posisi penting sebagai alat utama untuk mewujudkan otonomi daerah. Pemerintah daerah diharapkan dapat membuat perencanaan anggaran yang tepat, mendistribusikan sumber daya secara adil, serta menjamin bahwa pelaksanaan program berjalan dengan efisien dan efektif. Oleh karena itu, prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas menjadi landasan utama di setiap tahap pengelolaan keuangan daerah.

Selanjutnya, penerapan prinsip tata kelola yang baik dalam pengelolaan keuangan daerah memerlukan adanya informasi yang terbuka, keterlibatan masyarakat, serta pengawasan yang cukup. Kualitas pengelolaan keuangan daerah yang baik akan terlihat dari kesesuaian antara rencana dan realisasi anggaran, serta kemampuan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan. Di sisi lain, kekurangan dalam pengelolaan keuangan daerah dapat menyebabkan berbagai masalah, termasuk rendahnya penggunaan anggaran dan hasil pembangunan yang tidak optimal.

Serapan Anggaran

Serapan anggaran adalah ukuran yang digunakan untuk menilai sejauh mana anggaran yang disetujui dalam APBD dapat diwujudkan dalam bentuk pelaksanaan program dan kegiatan (Halim, 2014). Tingkat serapan yang tinggi biasanya menandakan bahwa pemerintah daerah mampu menjalankan program sesuai rencana yang telah dibuat. Namun, serapan anggaran tidak hanya diukur dari besarnya presentase realisasinya tetapi juga dari mutu pelaksanaannya.

Fenomena yang kerap terjadi di berbagai wilayah adalah adanya ketidakseimbangan dalam pola serapan anggaran, di mana realisasi anggaran seringkali rendah di awal tahun dan meningkat secara signifikan sebelum akhir tahun anggaran. Pola ini dikenal dengan istilah pengeluaran tertunda, yang menunjukkan adanya keterlambatan dalam menjalankan program. Situasi ini bisa disebabkan oleh

berbagai hal, seperti perencanaan yang belum matang, penundaan dalam proses pengadaan barang dan layanan, perubahan kebijakan, serta keterbatasan sumber daya manusia.

Selain itu, serapan anggaran yang rendah juga dapat dipengaruhi oleh kurangnya koordinasi antar organisasi perangkat daerah dan komplikasi dalam prosedur birokrasi yang menghalangi percepatan pelaksanaan kegiatan. Dalam beberapa situasi, sikap terlalu berhati-hati dalam penggunaan dana juga bisa menyebabkan penundaan pelaksanaan program. Ini menunjukkan bahwa masalah serapan anggaran tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga berkaitan dengan aspek manajemen dan kelembagaan.

Dengan demikian, untuk mengoptimalkan serapan anggaran dibutuhkan pendekatan yang menyeluruh, yang tidak hanya melalui perbaikan dalam perencanaan, tetapi juga peningkatan kapasitas pegawai, penyederhanaan prosedur, serta penguatan sistem koordinasi dan pengendalian anggaran.

Efektivitas Pengembangan Wilayah

Efektivitas pengembangan wilayah mencerminkan sejauh mana pemerintah daerah berhasil dalam mencapai sasaran pengembangan yang telah ditetapkan (Mardiasmo, 2018). Sasaran tersebut mencakup peningkatan kesejahteraan masyarakat, pertumbuhan ekonomi, pengurangan tingkat kemiskinan, serta peningkatan mutu layanan publik. Penilaian efektivitas pengembangan tidak hanya tergantung pada besar anggaran yang dihabiskan, tetapi juga pada sejauh mana hasil pengembangan dapat memberikan dampak yang nyata bagi masyarakat.

Dalam pelaksanaannya, efektivitas pengembangan wilayah sangat dipengaruhi oleh kualitas rencana dan realisasi anggaran. Rencana yang tidak sesuai dengan kenyataan atau tidak didasarkan pada kebutuhan dapat menghambat pencapaian sasaran pengembangan. Begitu pula, pelaksanaan anggaran yang tidak efisien dapat menyebabkan keterlambatan program, tidak tercapainya target kinerja, dan rendahnya kualitas hasil pengembangan.

Hubungan antara pemanfaatan anggaran dan efektivitas pengembangan menjadi sangat penting dalam konteks ini. Pemanfaatan anggaran yang baik dan merata sepanjang tahun anggaran akan mendukung kelancaran pelaksanaan program, sehingga hasil dari pengembangan dapat dirasakan lebih cepat dan merata oleh masyarakat. Di sisi lain, rendahnya penggunaan anggaran bisa mengakibatkan keterlambatan dalam pengembangan, penumpukan pekerjaan menjelang akhir tahun, serta kemungkinan penurunan kualitas hasil pengembangan.

Dengan demikian, peningkatan efektivitas pengembangan wilayah tidak dapat dipisahkan dari upaya untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah, terutama dalam mengoptimalkan pemanfaatan anggaran.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Serapan Anggaran

Beberapa studi sebelumnya menunjukkan bahwa rendahnya serapan anggaran dipengaruhi oleh berbagai unsur yang saling berhubungan. Unsur-unsur tersebut dapat dibagi menjadi beberapa kategori utama, yaitu perencanaan, pelaksanaan, sumber daya manusia, dan aspek kelembagaan.

Dalam hal perencanaan, penyusunan program yang tidak matang, tidak sesuai dengan kebutuhan di lapangan, dan kurangnya persiapan dokumen teknis sering kali menjadi alasan utama keterlambatan dalam melaksanakan kegiatan. Di tahap pelaksanaan, masalah yang sering terjadi mencakup keterlambatan dalam proses pengadaan barang dan jasa, perubahan peraturan, serta waktu pelaksanaan kegiatan yang terbatas. Dari perspektif sumber daya manusia, kurangnya kompetensi staf dalam mengelola anggaran juga menjadi faktor yang mempengaruhi rendahnya serapan anggaran. Selain itu, minimnya koordinasi antar instansi daerah serta kerumitan birokrasi juga memperparah keadaan tersebut. Faktor-faktor ini menunjukkan bahwa rendahnya serapan anggaran adalah permasalahan yang kompleks dan memerlukan penanganan yang menyeluruh.

Keterhubungan Antara Variabel (Dasar Pemikiran)

Dari studi teoritis tersebut, kita dapat melihat adanya hubungan yang kuat antara manajemen keuangan daerah, realisasi anggaran, dan efisiensi pembangunan daerah. Manajemen keuangan daerah yang efektif akan menghasilkan perencanaan dan pelaksanaan anggaran yang lebih baik, yang pada gilirannya akan mempercepat peningkatan realisasi anggaran. Selanjutnya, tingkat realisasi anggaran yang baik akan berdampak positif pada efisiensi pembangunan daerah.

Di sisi lain, ketidakberhasilan dalam manajemen keuangan daerah dapat menyebabkan rendahnya realisasi anggaran, yang pada akhirnya menghalangi pencapaian tujuan pembangunan. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi realisasi anggaran agar kita bisa memahami

seberapa efektif manajemen keuangan daerah berjalan. Kerangka pemikiran ini menjadi fondasi untuk penelitian tentang realisasi APBD di Kabupaten Bojonegoro dan pengaruhnya terhadap efisiensi pembangunan daerah.

METODE PENELITIAN

Pendekatan Penelitian, Studi ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif. Metode kualitatif dipilih karena tujuan penelitian ini adalah untuk memahami lebih dalam fenomena rendahnya penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bojonegoro dan dampaknya terhadap efektivitas pembangunan wilayah. Dengan pendekatan kualitatif, peneliti bisa memaparkan keadaan yang ada berdasarkan fakta, data, serta informasi-relevan lainnya, sehingga diperoleh gambaran yang komprehensif mengenai isu yang tengah diteliti. Pendekatan ini dianggap sesuai karena penelitian ini tidak hanya mengamati angka-angka realisasi anggaran, tetapi juga mengeksplorasi faktor-faktor yang memengaruhi implementasinya.

Metode Deskriptif Analitis, Metode analisis deskriptif dimanfaatkan untuk menjelaskan kondisi objek penelitian secara terstruktur, nyata, dan sesuai dengan fakta yang ada. Selain untuk memberi deskripsi tentang fenomena yang berlangsung, metode ini juga digunakan untuk menganalisis keterkaitan antara rendahnya serapan anggaran dan pelaksanaan pembangunan regional. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menjabarkan keadaan yang ada tetapi juga memberikan wawasan tentang penyebab dan konsekuensi dari masalah tersebut.

Objek Penelitian, Objek kajian ini adalah pengelolaan APBD Kabupaten Bojonegoro, khususnya pada aspek realisasi pengeluaran daerah atau serapan anggaran. Penelitian ini berfokus pada berbagai faktor yang mengakibatkan penyerapan anggaran yang belum optimal, seperti perencanaan program, pelaksanaan kegiatan, pengadaan barang dan jasa, kualitas sumber daya manusia di instansi, koordinasi antar perangkat daerah, serta masalah administratif yang muncul selama tahun anggaran berlangsung. Penelitian ini juga mengkaji dampak dari rendahnya serapan anggaran terhadap pembangunan daerah.

Jenis Data, Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah informasi yang dihimpun dari berbagai sumber tertulis tanpa melakukan pengumpulan data secara langsung dari responden. Sumber data termasuk laporan realisasi APBD Kabupaten Bojonegoro, dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), laporan evaluasi kinerja lembaga pemerintah, peraturan perundang-undangan tentang keuangan daerah, buku rujukan, artikel ilmiah, serta hasil penelitian yang berkaitan dengan tema studi ini. Penggunaan data sekunder dirasakan mampu menyediakan informasi yang komprehensif, objektif, dan sesuai dengan kebutuhan penelitian.

Teknik Pengumpulan Data, Pengumpulan data dilakukan lewat studi dokumentasi dan studi pustaka. Studi dokumentasi dilaksanakan dengan meneliti beragam dokumen resmi yang berkaitan dengan kebijakan anggaran daerah, data realisasi pengeluaran, serta laporan perkembangan Kabupaten Bojonegoro. Sedangkan, studi pustaka dilakukan dengan mengumpulkan teori, konsep, dan hasil penelitian terperinci dari buku maupun jurnal ilmiah. Kedua teknik tersebut digunakan agar data yang diperoleh lebih menyeluruh dan dapat mendukung analisis penelitian secara mendalam.

Teknik Analisis Data, Analisis data dilakukan dengan metode kualitatif melalui beberapa tahap. Tahap pertama adalah reduksi data, yakni memilih dan menyederhanakan informasi yang berkaitan dengan fokus penelitian. Kemudian, tahap kedua adalah penyajian data dalam bentuk narasi agar hubungan antarpermasalahan lebih mudah dipahami. Tahap ketiga adalah penarikan kesimpulan melalui interpretasi terhadap data yang telah dianalisis untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya penyerapan APBD serta dampaknya terhadap efektivitas pembangunan daerah.

Untuk memastikan keakuratan data, studi ini menerapkan teknik triangulasi sumber, yang berarti membandingkan informasi dari berbagai referensi yang berbeda. Jika data menunjukkan konsistensi di antara sumber-sumber tersebut, maka data ini dianggap memiliki tingkat validitas yang tinggi. Dengan pendekatan penelitian ini, diharapkan studi ini dapat memberikan pemahaman yang menyeluruh tentang rendahnya serapan APBD Kabupaten Bojonegoro serta berfungsi sebagai masukan bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran dan pembangunan daerah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Serapan APBD Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021–2025

Serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah salah satu ukuran yang krusial untuk menilai seberapa efektif pengelolaan keuangan di tingkat daerah. Tingkat serapan ini mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam menjalankan belanja sesuai dengan program yang telah ditetapkan. Semakin meningkat serapan anggaran, maka semakin besar kemungkinan target pembangunan dapat tercapai dengan baik. Di sisi lain, serapan yang rendah menunjukkan adanya kendala dalam pelaksanaan kegiatan.

Dari sudut pandang administrasi publik, anggaran tidak hanya berfungsi sebagai sumber pendanaan, tetapi juga sebagai instrumen untuk kebijakan pembangunan. Oleh sebab itu, jika terdapat keterlambatan atau serapan anggaran yang rendah, hal ini akan berdampak pada pelaksanaan layanan publik, pembangunan infrastruktur, serta pencapaian sasaran kinerja pemerintah daerah.

Menurut informasi yang diperoleh dari berbagai sumber resmi serta laporan berita daerah, perkembangan serapan APBD Kabupaten Bojonegoro masih menunjukkan kondisi yang berfluktuasi selama periode 2021–2025.

Tahun	Total APBD / Pagu Belanja	Realisasi Belanja	Persentase Serapan
2021	Rp.6,01 triliun	Rp.5,14 triliun	85,52%
2022	Rp.6,42 triliun	Rp.5,53 triliun	86,14%
2023	Rp.7,12 triliun	Rp.5,60 triliun	78,60%
2024	Rp.8,20 triliun	Rp.6,55 triliun	79,87%
2025	Rp.7,80 triliun	Rp.6,20 triliun	79,94%

Berdasarkan data yang disajikan, tahun 2021 dan 2022 menunjukkan angka penyerapan yang cukup baik karena berada di atas 85 persen. Situasi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan anggaran daerah masih cukup terkelola dengan baik dan program-program pemerintah dapat dilaksanakan dengan tingkat realisasi yang baik. Namun, pada tahun 2023 terjadi penurunan yang cukup signifikan menjadi 78,60 persen. Penurunan ini menandakan bahwa meskipun nilai APBD meningkat, hal itu tidak diimbangi dengan kemampuan untuk merealisasikan anggaran secara seimbang.

Pada tahun 2024, meskipun nilai APBD naik menjadi Rp8,20 triliun, realisasi belanja hanya mencapai 79,87 persen. Ini berarti terdapat sejumlah anggaran yang cukup besar yang belum digunakan secara maksimal. Tahun 2025 menunjukkan sedikit kemajuan, dengan realisasi Rp6,20 triliun atau 79,94 persen dari total APBD sebesar Rp7,80 triliun. Walaupun ada peningkatan, persentase yang tercatat masih di bawah tingkat yang diharapkan.

Secara keseluruhan, data selama lima tahun terakhir menunjukkan bahwa tantangan utama Kabupaten Bojonegoro tidak hanya terletak pada besarnya kapasitas fiskal, tetapi juga pada kemampuan untuk melaksanakan anggaran secara efektif dan tepat waktu. Hal ini sangat penting karena Bojonegoro adalah daerah dengan pendapatan yang cukup besar, sehingga anggaran yang tidak terpakai akan mengakibatkan opportunity cost terhadap pembangunan daerah.

Faktor Penyebab Rendahnya Serapan APBD

Serapan APBD Kabupaten Bojonegoro yang rendah disebabkan oleh berbagai faktor baik dari dalam maupun luar. Masalah ini biasanya berhubungan dengan perencanaan program, administrasi, mutu aparatur, dan perubahan kebijakan yang terjadi sepanjang tahun.

Faktor penyebab	Dampak terhadap serapan
Perencanaan belum matang	Program terlambat dimulai
Pengadaan barang/jasa lambat	Proyek fisik tertunda
SDM aparatur belum merata	Administrasi keuangan lambat
Koordinasi antar OPD lemah	Pengambilan keputusan terhambat
Perubahan regulasi	Penyesuaian kegiatan tertunda

Faktor pertama adalah kurangnya efektivitas dalam perencanaan kegiatan. Sering kali, meskipun program telah direncanakan dan dianggarkan, dokumen teknis, desain aktivitas, atau kesiapan lokasi masih belum lengkap di awal tahun. Hal ini mengakibatkan program baru dapat dilaksanakan hanya setelah pertengahan tahun anggaran.

Faktor kedua adalah lambatnya proses pengadaan barang dan layanan. Prosedur lelang yang

memerlukan banyak tahapan administrasi sering kali menjadi penyebab keterlambatan dalam realisasi pengeluaran modal. Apabila pengadaan dimulai dengan terlambat, maka pekerjaan fisik juga akan terhambat.

Faktor ketiga adalah tingkat keterampilan sumber daya manusia dalam aparatur. Tidak semua pegawai memiliki keahlian teknis yang setara dalam hal manajemen keuangan, penyusunan laporan, atau pemahaman mengenai regulasi yang terbaru. Keadaan ini dapat mengakibatkan keterlambatan dalam pelaksanaan kegiatan.

Di samping itu, kurangnya koordinasi antara organisasi perangkat daerah turut mempengaruhi penyerapannya anggaran. Program yang melibatkan banyak sektor memerlukan komunikasi dan sinkronisasi yang efektif. Jika koordinasi tidak berjalan dengan baik, maka pelaksanaan kegiatan akan menjadi lamban.

Temuan ini sejalan dengan berbagai penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa rendahnya serapan anggaran daerah biasanya disebabkan oleh perencanaan yang lemah, kapasitas birokrasi yang terbatas, serta keterlambatan dalam pengadaan barang dan layanan.

Implikasi terhadap Efektivitas Pembangunan Daerah

Minimnya penyerapan APBD berpengaruh langsung terhadap kinerja pembangunan daerah. Saat anggaran tidak segera dilaksanakan, maka program-program yang sudah disusun tidak dapat berjalan sesuai rencana.

Bidang Pembangunan	Dampak
Infrastruktur	Jalan, jembatan, drainase terlambat selesai
Pendidikan	Pengadaan sarana sekolah tertunda
Kesehatan	Program layanan dan fasilitas terlambat
Ekonomi daerah	Perputaran ekonomi lokal melambat
Sosial	Bantuan masyarakat tidak tepat waktu

Pada bidang infrastruktur, keterlambatan dalam penggunaan anggaran mengakibatkan pembangunan fasilitas umum tidak dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang ditentukan. Hal ini bisa mengganggu pergerakan masyarakat serta kegiatan ekonomi.

Di bidang pendidikan dan kesehatan, keterlambatan dalam mengeluarkan anggaran berdampak pada pengadaan alat-alat pembelajaran, peralatan medis, pemeliharaan sarana, maupun pelaksanaan program layanan dasar. Konsekuensinya, kualitas layanan publik menjadi kurang optimal.

Dari perspektif ekonomi daerah, pengeluaran pemerintah berfungsi sebagai pendorong utama ekonomi lokal. Apabila pencairan anggaran mengalami keterlambatan, maka proyek-proyek pemerintah yang melibatkan kontraktor lokal, usaha kecil dan menengah, tenaga kerja, serta penyedia layanan akan mengalami penundaan. Situasi ini mengakibatkan pengurangan peredaran uang di masyarakat.

Oleh karena itu, rendahnya penyerapan APBD bukan sekadar masalah administratif, tetapi juga berpengaruh langsung terhadap kesejahteraan masyarakat dan pencapaian pembangunan daerah.

Upaya untuk Meningkatkan Penyerapan APBD

Untuk meningkatkan pencairan anggaran, pemerintah daerah perlu memperbaiki kualitas perencanaan sebelum tahun anggaran dimulai. Dokumen kegiatan, jadwal pelaksanaan, serta kesiapan administrasi sebaiknya diselesaikan lebih awal.

Selain itu, proses pengadaan barang dan jasa harus dipercepat dengan sistem yang efisien dan tetap transparan. Peningkatan kapasitas pegawai melalui pelatihan teknis juga sangat penting agar pengelolaan anggaran menjadi lebih profesional.

Penting pula untuk melakukan evaluasi secara berkala setiap triwulan guna memantau perkembangan penyerapan anggaran. Jika terdapat hambatan, pemerintah daerah bisa segera mengambil tindakan yang diperlukan.

Secara keseluruhan, rendahnya penyerapan APBD Kabupaten Bojonegoro antara tahun 2021 hingga 2025 menunjukkan bahwa meskipun kapasitas fiskal yang besar siap ada, tidak menjamin pembangunan yang optimal. Diperlukan perbaikan dalam pengelolaan anggaran agar seluruh potensi keuangan daerah dapat dimanfaatkan dengan maksimal untuk kesejahteraan masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil studi dan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bojonegoro untuk periode 2021–2025 masih menunjukkan hasil yang belum sepenuhnya maksimal. Meskipun Kabupaten Bojonegoro memiliki kapasitas fiskal yang cukup besar dibandingkan beberapa daerah lainnya, besarnya anggaran tersebut tidak diiringi dengan tingkat realisasi belanja yang optimal. Data menunjukkan bahwa persentase penyerapan anggaran berfluktuasi dari tahun ke tahun, bahkan dalam beberapa periode masih di bawah target yang diinginkan. Ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah masih menghadapi tantangan dalam melaksanakan program pembangunan dengan cara yang efektif dan tepat waktu.

Rendahnya penyerapan APBD dipengaruhi oleh sejumlah faktor yang saling terkait. Salah satu faktor utama yang ditemukan dalam penelitian ini adalah kurang optimalnya proses perencanaan program dan kegiatan sejak awal tahun anggaran. Perencanaan yang kurang matang mengakibatkan beberapa kegiatan tidak dapat langsung dilaksanakan dikarenakan dokumen teknis yang belum siap, jadwal yang belum ditetapkan dengan baik, atau kebutuhan lapangan yang belum teridentifikasi secara menyeluruh. Situasi ini berdampak pada penundaan pelaksanaan kegiatan serta rendahnya realisasi anggaran di awal tahun.

Selain perencanaan, proses pengadaan barang dan jasa juga menjadi salah satu penyebab signifikan rendahnya penyerapan anggaran. Tahapan administrasi yang lama serta keterlambatan dalam pelaksanaan tender menyebabkan berbagai proyek fisik dan pengadaan kebutuhan pemerintah daerah tidak bisa mulai tepat waktu. Hal ini menyebabkan banyak kegiatan baru dilaksanakan di tengah hingga akhir tahun anggaran. Pola ini mengakibatkan penumpukan realisasi belanja di akhir tahun dan berpotensi menurunkan kualitas hasil pekerjaan.

Faktor lain yang mempengaruhi rendahnya serapan APBD adalah keterbatasan kemampuan sumber daya manusia aparatur dalam pengelolaan keuangan daerah. Tidak semua pegawai memiliki keterampilan teknis yang sama terkait penyusunan administrasi, pengelolaan dokumen keuangan, maupun pemahaman terhadap perubahan peraturan. Selain itu, koordinasi antar organisasi perangkat daerah juga perlu diperkuat agar pelaksanaan program lintas sektor dapat dilakukan dengan lebih efisien dan cepat.

Studi ini juga menunjukkan bahwa rendahnya serapan APBD berdampak signifikan terhadap efektivitas pembangunan daerah. Keterlambatan penyerapan anggaran mengakibatkan pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, saluran air, dan fasilitas publik lainnya tidak diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Dalam sektor pelayanan publik, keterlambatan anggaran juga berpengaruh pada pelaksanaan program pendidikan, kesehatan, serta pelayanan sosial kepada masyarakat. Dengan demikian, manfaat dari anggaran yang sebenarnya bisa dirasakan masyarakat menjadi tertunda.

Dari sudut pandang ekonomi daerah, lambatnya belanja pemerintah mengakibatkan perputaran ekonomi lokal tidak berjalan secara optimal. Belanja daerah pada dasarnya memiliki efek berganda terhadap pertumbuhan ekonomi karena melibatkan tenaga kerja, penyedia jasa, pelaku usaha kecil, serta berbagai sektor pendukung lainnya. Ketika penyerapan anggaran rendah, dampak positif terhadap perekonomian daerah juga berkurang. Ini menunjukkan bahwa pengelolaan APBD memiliki hubungan yang erat dengan peningkatan kesejahteraan Masyarakat.

Berdasarkan temuan tersebut, pemerintah Kabupaten Bojonegoro perlu melakukan langkah perbaikan yang terarah dan berkelanjutan. Perencanaan program harus disusun lebih baik sebelum tahun anggaran dimulai agar kegiatan dapat dilaksanakan mulai awal tahun. Proses pengadaan barang dan jasa perlu dipercepat melalui sistem yang lebih efisien, tetapi tetap transparan dan akuntabel. Selain itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur melalui pelatihan teknis serta penguatan koordinasi antar perangkat daerah juga menjadi prioritas utama.

Evaluasi dan pemantauan yang dilakukan secara rutin terhadap pelaksanaan anggaran sangatlah penting. Melalui penilaian setiap tiga bulan, pemerintah daerah mampu mendeteksi kendala lebih awal dan segera mengambil tindakan perbaikan. Dengan pengawasan yang tepat, pelaksanaan anggaran dapat berlangsung lebih merata sepanjang tahun dan tidak terakumulasi di akhir periode anggaran.

Secara keseluruhan, penelitian ini menekankan bahwa rendahnya penggunaan APBD di Kabupaten Bojonegoro tidak hanya merupakan masalah administratif, melainkan juga terkait langsung dengan efektivitas pembangunan daerah, kualitas layanan publik, dan kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu, pengelolaan APBD yang optimal harus menjadi fokus utama pemerintah daerah agar semua potensi fiskal yang ada dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan mengutamakan kepentingan masyarakat luas.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, S. (2018). *Manajemen Keuangan Daerah*. Jakarta: Rajawali Pers.

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2023). *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro*. Jakarta: BPK RI.

Bojonegoro Dalam Angka. (2024). *Kabupaten Bojonegoro Dalam Angka 2024*. Bojonegoro: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bojonegoro.

Budiarto, H. (2020). Analisis serapan anggaran belanja daerah dan faktor-faktor yang memengaruhinya. *Jurnal Administrasi Publik*, 7(2), 115–128.

Halim, A. (2017). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.

Halim, A., & Kusufi, M. S. (2019). *Teori, Konsep, dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.

Hasibuan, R. (2021). Pengaruh kualitas perencanaan terhadap realisasi anggaran pemerintah daerah. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 9(1), 33–47.

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2020). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta: Kemendagri.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2022). *Kajian Fiskal Regional Provinsi Jawa Timur*. Jakarta: Kemenkeu RI.

Mahmudi. (2016). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Mahmudi. (2019). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.

Nugroho, T. (2020). Efektivitas belanja daerah dalam mendukung pembangunan ekonomi lokal. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 12(3), 201–214.

Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. (2023). *Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2023*. Bojonegoro: Pemkab Bojonegoro.

Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. (2024). *Realisasi APBD Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2024*. Bojonegoro: Pemkab Bojonegoro.

Prasetyo, D. (2021). Hubungan serapan anggaran dengan kualitas pelayanan publik daerah. *Jurnal Kebijakan Publik*, 10(2), 88–101.

Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Sekretariat Negara.

Republik Indonesia. (2022). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Sekretariat Negara.

Sari, N. P. (2022). Analisis kendala penyerapan APBD pada pemerintah daerah di Indonesia. *Jurnal Administrasi Negara*, 14(1), 55–69.

Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Sukirno, S. (2017). *Ekonomi Pembangunan: Proses, Masalah, dan Dasar Kebijakan*. Jakarta: Kencana.

Wibowo, A. (2021). Pengaruh kapasitas aparatur terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah. *Jurnal Manajemen Pemerintahan*, 8(2), 142–156.